**PEMBARUAN PERADILAN SEBAGAI** **IKHTIAR MEWUJUDKAN *COURT EXCELLENCE***

Dr.Ridwan Mansyur, S.H., M.H.[[1]](#footnote-2)

*Nothing endures but change*,[[2]](#footnote-3) begitulah statemen Heraclictus, seorang filsuf kenamaan Yunani. Di dunia ini tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Demikian halnya kebutuhan atas layanan pengadilan, seiring perkembangan zaman, ia terus berkembang dan berubah. Publik menghendaki agar pengadilan mampu dan senantiasa beradaptasi dengan laju perkembangan peradaban. Tidak ada jalan lain untuk dapat memenuhi ekspektasi publik tersebut kecuali dengan satu cara: pembaruan.

Mahkamah Agung memiliki komitmen serius dalam hal pembaruan peradilan.Untuk mempertegas komitmentersebut, disusunlah Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.[[3]](#footnote-4). Cetak biru ini merupakanpeta jalan sekaligus mercusuar yang akan memandu dan memberi petunjuk arah pembaruan peradilan agar dapat berjalan lebih terstruktur, terukur, serta tepat sasaran.

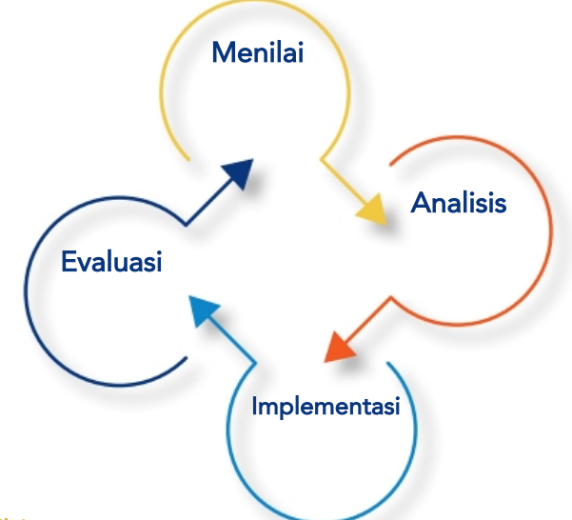
Pembaruan peradilan mutlak diperlukan untuk memenuhi nilai-nilai inti*Court Excellence.* Bertolak dari sini, kemudian muncullah pertanyaan: 1) nilai-nilai apa saja yang mutlak harus dipenuhi untuk mewujudkan *Court Excellence*?2) apa saja pembaruan-pembaruanyang telah diikhtiarkan oleh Mahkamah Agung? 3) apakah pembaruan-pembaruan yang dilakukan Mahkamah Agung tersebut telah selaras dengan nilai-nilai *Court Excellence*? Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

**Nilai-Nilai Inti*Court Excellence***

Dalam mengagendakan pembaruan, Mahkamah Agung mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, sedangkan Cetak Biru tersebut disusun dengan menggunakan pendekatan Kerangka Pengadilan yang Unggul *(The Framework of Court Excellence).[[4]](#footnote-5)*Kehendak terwujudnya peradilan yang unggul bukan saja terjadi di Indonesia. Dunia internasional juga menghendaki hal itu. Oleh karenanya, peradilan-peradilan di belahan dunia kemudian bertemu, menyepakati, dan menerapkan sebuah standar internasional untuk menyelenggarakan sistem peradilan. Standar tersebut dinamakan dengan *International Framework for Court Excellence*.

*International Framework for Court Excellence* adalah sistem manajemen mutu yang dirancang untuk membantu pengadilan meningkatkan kinerjanya. Sistem ini merupakan pendekatan yang komprehensif untuk mencapai pengadilan yang unggul. Kerangka ini merupakan metodologi peningkatan berkelanjutan yang memandu perjalanan pengadilan untuk menuju pengadilan yang unggul dengan memastikan pengadilan secara aktif dan terus-menerus meninjau kinerjanya sekaligus mencari cara untuk meningkatkan kinerjanya. Ada empat kegiatan primer dalam siklus kerangka ini:[[5]](#footnote-6)

1. Penilaian mandiri. Siklus ini adalah pemeriksaan kondisi pengadilan dan melibatkan analisis kinerja di tujuh area;
2. Analisis mendalam atas penilaian mandiri untuk menentukan bidang-bidang kerja pengadilan apa saja yang mampu ditingkatkan;
3. Rencana perbaikan dikembangkan dengan merinci area yang diidentifikasi untuk perbaikan, tindakan yang diusulkan untuk perbaikan, dan hasil yang ingin dicapai;
4. Pemantauan rencana peningkatan berdasarkan tinjauan dan perbaikan.

**Metodologi Penilaian Berkelanjutan**

(Sumber: https://www.courtexcellence.com/\_\_data/assets/pdf\_file/0027/61479/The-International-Framework-3E-Indonesian.pdf)

*International Framework for Court Excellence* mengakui ada kesepakatan internasional mengenai nilai-nilai inti yang diterapkan oleh pengadilan dalam menjalankan peran mereka. Nilai-nilai inti ini membantu pengadilan untukmewujudkan proses hukum yang adil dan tersedianya perlindungan hukum yang sama di hadapan hukum untuk semua orang yang memiliki kepentingan di pengadilan.[[6]](#footnote-7)Nilai-nilai inti tersebut adalah:

*Pertama, fairness.Fairness* identik dengan keadilan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan keadilan sebagai:  1) sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak, 2) berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; 3 sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama. Adil menurut seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Oleh sebab itu, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.[[7]](#footnote-8)

*Kedua, impartiality.*Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang berkeadilan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, aparatur peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.[[8]](#footnote-9)

*Ketiga, independence.*Kemandirian dapat dipilah menjadi dua jenis: kemandirian institusional dan kemandirian fungsional. Kemandirian institusional berarti bahwa badan peradilan harus bebas dari intervensi pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Sedangkan kemandirian fungsional artinya setiap aparatur peradilan wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

*Keempat, competence.*Kompeten artinya cakap; mengetahui.[[9]](#footnote-10)Salah satu kriteria badan peradilan unggul adalah apabila ia mampu mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. [[10]](#footnote-11)

*Kelima, transparency.*Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Keterbukaan informasi ini adalah unsur terpenting dalam terminologi transparansi badan peradilan.

*Keenam, accessibility.*Akses untuk memperoleh keadilan merupakan hak setiap warga negara tanpa membedakan strata sosialnya. Akses terhadap keadilan *(access to justice)* dapat diartikan sebagai kesempatan untuk mendapatkan keadilan yang berlaku bagi semua kalangan atau sering disebut dengan istilah *justice for all*. Dalam kerangka normatif, negara telah memberikan jaminan dan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh keadilan, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 28D UUD 1945.[[11]](#footnote-12)

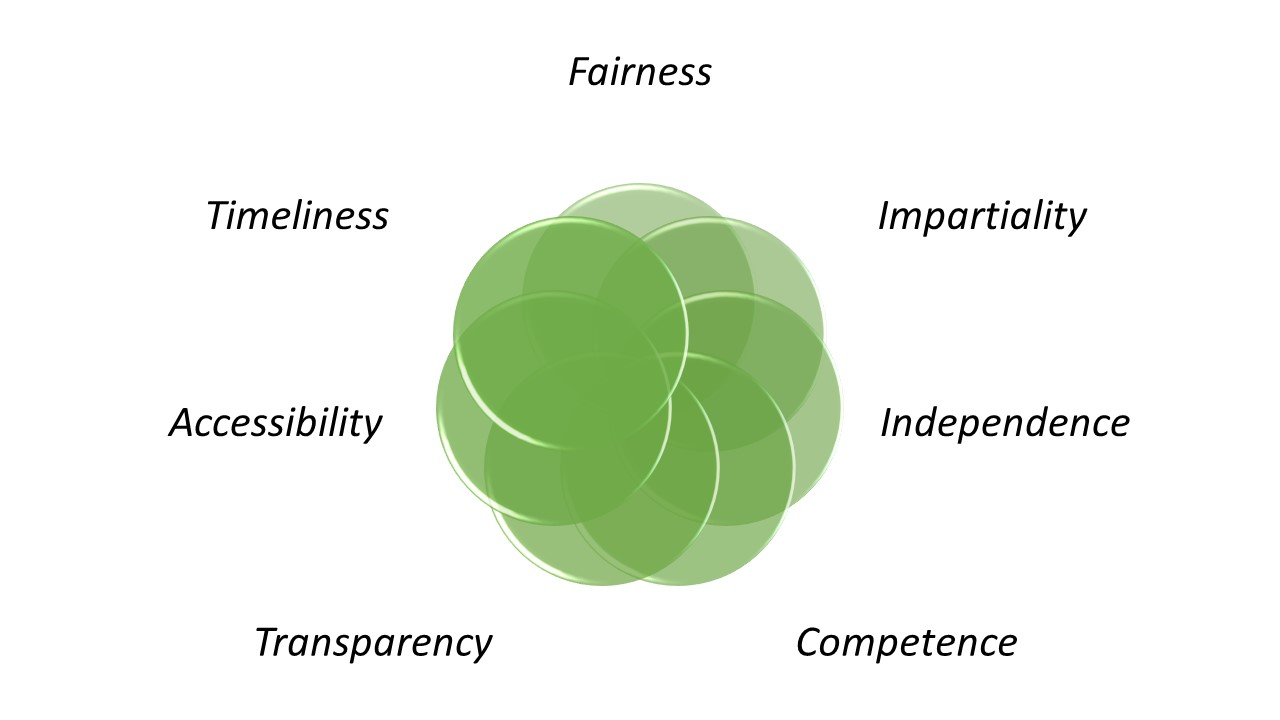
*Ketujuh, timeliness.*Ketepatan waktu mencerminkan keseimbangan antara waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan, menyajikan, serta menimbang bukti hukum, aturan hukum, argumen hukum, dengan penundaan yang tidak beralasan akibat proses yang tidak efisien atau sumber daya yang tidak mencukupi. Nilai dasar tersebut tidak kalah penting dari jaminan kepastian hukum.[[12]](#footnote-13)

*Kedelapan, certainty.*Maksud kepastian di sini adalah bahwa keputusan berasal dari aturan, prinsip, dan preseden yang telah ditetapkan, dan pada titik tertentu akan dianggap 'final' baik pada tingkat pertama atau melalui proses upaya hukum.[[13]](#footnote-14) Selain bermakna kesatuan hukum, kepastian juga dapat diartikan sebagai kepastian prosedur layanan.

*Kesembilan, equality.* Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

*Kesepuluh, integrity.*Integritas ini meliputi transparansi dan kepatutan di antara proses, keputusan, dan pembuat keputusan. Keadilan tidak hanya harus diwujudkan, tetapi harus dilakukan secara transparan dan terlihat dengan jelas.[[14]](#footnote-15)

**Nilai-Nilai Inti *Court Excellence***

****

**Potret Pembaruan Mahkamah Agung**

Pembaruan-pembaruan di Mahkamah Agung dilakukan secara berkelanjutan dan berorientasi pada tujuan sebagai berikut:*pertama,* organisasi berbasis kinerja *(performancebasedorganization), kedua*, organisasi berbasis pengetahuan *(knowledge based organization),* dan *ketiga,* sistem pengelolaan organisasi.

Arah pembaruan Mahkamah Agung difokuskan pada bidang-bidang berikut: Pembaruan Manajemen Perkara, Pembaruan Fungsi Teknis, Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan, Pembaruan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan, Pembaruan Pengelolaan Anggaran, Pembaruan Pengelolaan Aset, Pembaruan Teknologi Informasi, Pembaruan Sistem Pengawasan, dan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi. Namun mengingat ruang dan waktu yang terbatas, dalam artikel ini fokus kajian yang dilakukan terbatas padapembaruan pada bidang Manajemen Perkara dan pembaruan Fungsi Teknis.

1. Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda pembaruan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:*pertama,* modernisasi manajemen perkara, *kedua,* penataan ulang organisasi manajemen perkara, dan*ketiga,* penataan ulang proses manajemen perkara.

*Pertama,* modernisasi manajemen perkara. Mahkamah Agung membagi arah pengembangan dukungan manajemen perkara menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. keterbukaan dan revitalisasi sistem pelaporan
2. modernisasi business process dan pelayanan publik, dan
3. pelayanan hukum terintegrasi.

Pada kelompok 1 (keterbukaan dan revitalisasi sistem pelaporan), Mahkamah Agung telah mengupayakan banyak pembaruan, antara lain:

1. Direktori Putusan

Direktori Putusan adalah sistem berbasis situs web yang dimiliki oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan Mahkamah Agung dan putusan pengadilan dari empat lingkungan peradilan, baik tingkat pertama maupun tingkat banding di seluruh Indonesia. Hingga artikel ini ditulis, putusan yang telah terpublikasikan di sistem tersebut berjumlah 6.559.634 putusan. Kepaniteraan Mahkamah Agung kemudian mengembangkan sistem ini sehingga konten yang termuat dalam sistem tersebut tidak hanya Putusan, tetapi juga mencakup Yurisprudensi, Rumusan Rakernas, Restatemen, Kompilasi Kaidah Hukum, dan Putusan Penting.

1. Info Perkara

Dalam skop yang lebih kecil, yakni khusus perkara pada lingkungan Mahkamah Agung, Kepaniteraan Mahkamah Agung juga memiliki sistem Info Perkara. Info Perkara ini merupakan aplikasi yang dapat memudahkan para pencari informasi untuk melihat informasi perkara yang ada di Mahkamah Agung.

1. Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara (SIPP) pada seluruh pengadilan di Indonesia

Salah satu lompatan besar Mahkamah Agung adalah pemberlakuan SIPP. Aplikasi ini merupakan sistem administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Aplikasi SIPP ini membantu pengadilan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara secara lebih efektif dan efisien. Dengan aplikasi ini pula sistem pelaporan menjadi sederhana dengan berbasis elektronik. Bagi pencari keadilan, aplikasi ini memudahkan mereka untuk mengakses informasi tentang proses atau perjalanan suatu perkara.

1. *Virtual Account* (VA) untuk pembayaran biaya perkara pada Mahkamah Agung

Sejak akhir tahun 2017 Kepaniteraan Mahkamah Agung telah melakukan modernisasi sistem pembayaran biaya perkara kasasi, peninjauan kembali, dan pengiriman biaya penyampaian dokumen ke luar negeri, yaitu dengan menggunakan *virtual account.* Sistem ini memudahkan pengelolaan keuangan perkara, karena setiap ada uang masuk ke rekening penampung, dapat diketahui sumber dananya.

1. Optimalisasi Website

Website adalah media yang efektif untuk mempublikasikan informasi pengadilan. Oleh sebab itu, fungsinya perlu dioptimalkan.Mahkamah Agung terus berusaha untuk mengoptimalkan fungsi website ini dengan melengkapi dan mengupdate konten. Selain Mahkamah Agung, untuk mendukung fungsi transparansi, Kepaniteraan Mahkamah Agung juga membangun dan mengelola website tersendiri. Website juga dimiliki oleh seluruh pengadilan pada empat lingkungan badan peradilan. Untuk mengoptimalkan website pada satker pengadilan, masing-masing Direktorat Jenderal Peradilan di bawah Mahkamah Agung telah mengeluarkan keputusan mengenai standarisasi konten website pengadilan. Standarisasi ini dinilai sangat tepat agar informasi yang dapat terpublikasikan pengadilan lengkap dan utuh.

1. Publikasi Landmark Decision, Yurisprudensi, dan Surat Edaran Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar

Salah satu indikator peradilan yang unggul adalah adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dapat tercermin dari adanya kesatuan hukum. Untuk mewujudkan kesatuan hukum tersebut Mahkamah Agung kemudian memproduksi kemudian mempublikasikan Landmark Decision, Yurisprudensi, dan Surat Edaran Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar secara berkala, baik melalui Laporan Tahunan, buku, website, atau media lain.

Adapun terkait kelompok 2 (modernisasi *business process* dan pelayanan publik), pembaruan-pembaruan yang telah diupayakan antara lain:

1. *E-Court*

*E-Court*adalah layanan pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran biaya perkara secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.*E-Court*mencakup:

1. *e-Filing* (pendaftaran perkara online)
2. *e-Payment* (pembayaran panjar biaya perkara online)
3. *e-Summons* (pemanggilan pihak secara online)
4. *e-Litigation* (persidangan secara online)

*E-Court* pada mulanya diberlakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Pada tahun 2020 penggunaan *e-court* untuk pendaftaran perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara melonjak dahsyat. Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020, pada tahun tersebut perkara pada peradilan tingkat pertama yang didaftarkan melalui *­e-court* jumlahnya meningkat hingga 295,79%.

Inovasi *e-Court*mendapat apresiasi yang luar biasa dari berbagai kalangan, termasuk dari Kepala Negara Republik Indonesia. Dalam acara Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, PresidenRepublik Indonesia, Joko Widodo, melontarkan pujian tingkat tinggi kepada Mahkamah Agung yang telah berhasil memanfaatkan teknologi untuk mewujudkan peradilan berbasis elektronik.[[15]](#footnote-16)

1. Percepatan Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung

Salah satu jalan pintas untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah dengan melakukan percepatan penyelesaian perkara. Percepatan ini tentu dengan tetap memperhatikan kualitas putusan. Dalam hal percepatan ini, Mahkamah Agung telah menampilkan capaian yang luar biasa. Beban perkara Mahkamah Agung pada tahun 2020 meningkat menjadi 20.761 perkara atau naik 6,07% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 20.275 perkara. Hebatnya, capaian memutus perkara Mahkamah Agung di tahun 2020 mencapai 20.562 perkara (99,04%). Artinya, sisa perkara hanyalah sebanyak 199 (0,96%). Dari data-data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2020 Mahkamah Agung menerima perkara dengan jumlah terbanyak, menyisakan tunggakan perkara *(case backlog)* dengan jumlah terkecil, serta mencatatkan rasio produktivitas memutus tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Capaian membanggakan ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah perkara yang pemeriksaannya kurang dari tiga bulan, yaitu sebesar 96,65% dari jumlah beban perkara. Angka ini juga merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung.[[16]](#footnote-17)

1. Prosedur Baru Rogatory

Prosedur penyampaian panggilan/pemberitahuan bagi pihak berperkara yang bertempat tinggi di luar negeri sebelumnya belum mendapat pengaturan yang jelas dalam hukum acara. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri menyusun nota kesepahaman. Pertama, nota kesepahaman yang ditandatangani pada tanggal 19 Februari 2013 antara Panitera Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. Kedua, nota kesepahaman yang ditandatangani pada tanggal 20 Februari 2018. Ketiga, nota kesepahaman yang ditandatangani pada tanggal 20 Februari 2019.[[17]](#footnote-18)Upaya ini merupakan bentuk modernisasi prosedur rogatory, agar lebih jelas, efektif dan efisien.

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) seluruh Pengadilan di Indonesia

PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.[[18]](#footnote-19)Kehadiran PTSP ini sangat efektif memangkas jalur pelayanan. Dengan adanya PTSP, para pencari keadilan tidak perlu lagi menempuh terlalu banyak jaluruntuk mendapatkan layanan pengadilan. Standarisasi PTSP ini diatur oleh masing-masing Direktorat Jenderal Pengadilan.

1. Layanan Prodeo, Sidang di Luar Gedung, dan Posbakum

*Justice for all* bagi Mahkamah Agung bukan sekadar jargon semata. Untuk mewujudkan nilai itu, pada tahun 2014 ditetapkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan. Dalam Perma tersebut diatur ketentuan mengenai pedoman bantuan hukum meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan.

1. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pembangunan WBK dan WBBM merupakan usaha yang terukur, terstruktur, dan terstandarisasi dalam mewujudkan peradilan yang bersih dari korupsi sekaligus birokrasi yang bermental melayani. Pada tahun 2019, Satker yang meraih predikat WBK sejumlah 63 unit Satker. Selanjutnya, di masa pandemi, yakni di tahun 2020, justru meningkat. Sebanyak 85 Satker berhasil meraih predikat WBK, salah satu peraihnya adalah Eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Pada tahun 2020 juga terdapat sembilan Satker yang menerima predikat WBBM.

1. Perlindungan Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Perempuan seringkali berada pada titik inferior saat berhadapan dengan hukum. Oleh sebab itu Mahkamah Agung terpanggil untuk mewujudkan perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Mahkamah Agung kemudian menetapkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Terkait kelompok 3 (pelayanan hukum terintegrasi), Mahkamah Agung juga telah mengupayakan beberapa langkah. Pelayanan hukum terintegrasi dalam hal ini mencakup: 1) integrasi dengan penegak hukum lain, 2) terintegrasi dalam pengadilan online, dan 3) terintegrasi dengan sistem login tunggal advokat. Upaya yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung terkait pembaruan kelompok 3 ini antara lain:

1. Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)

SPPT-TI adalah sistem pertukaran data perkara pidana secara elektronik diantara 4 lembaga penegak hukum (Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI, Ditjen PAS Kemenkumham RI). Pengembangan SPPT-TI juga melibatkan Bappenas RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemkominfo RI) dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara).[[19]](#footnote-20)

SPPT-TI adalah satu kesatuan rangkaian dari sistem manajemen perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan atau penetapan yang melibatkan komponen peradilan pidana yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas dengan memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam penegakan hukum.Adapun dokumen yang dipertukarkan dan menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri adalah Penetapan Majelis Hakim, Penetapan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Amar Putusan dan Salinan Putusan. Implementasi SPPT-TI ini tidak menggantikan sistem yang saat ini sudah ada di Pengadilan Negeri, dan bahwa pertukaran data dilakukan pada tingkat pusat sehingga tugas Pengadilan Negeri adalah melakukan penginputan dengan lengkap seluruh dokumen proses persidangan pada Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara (SIPP).

1. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara pengadilan negeri/pengadilan agama/mahkamah syari’ah dengan dinaskependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota, dan kantor urusan agama kecamatan dalam layanan keliling untuk memberikan layanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai kewenangan pengadilan negeri dan itsbat nikah sesuai kewenangan pengadilan agama/mahkamah syari’ah untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.[[20]](#footnote-21)

1. Pengambilan Salinan Putusan via aplikasi e-Court

Integrasi data dengan sistem e-Court memiliki banyak keunggulan. Salah satu keunggulannya adalah para pihak tidak perlu datang ke pengadilan untuk mengambil salinan putusan. Salinan putusan yang telah ditandatangani secara elektronik oleh panitera pengadilan dapat diunduh oleh pihak berperkara, tentunya setelah ia membayar terlebih dahulu biaya PNBP dan Leges Panitera yang akan tersedia secara otomatis dengan virtual account di laman e-court tersebut.

*Kedua,* penataan ulang organisasi manajemen perkara. Pada tahun 2015, Mahkamah Agung melakukan langkah revolusioner, yakni penataan ulang organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan untuk peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Penataan ulang tersebut dipayungi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Sebelum ditata ulang, panitera dan sekretaris pengadilan dijabat oleh orang yang sama, pasca terbitnya Perma tersebut, panitera dan sekretaris pengadilan dijabat oleh dua orang berbeda. Dengan demikian panitera dapat fokus mengelola kepaniteraan dan sekretarisdapatfokus menjalankan tugas kesekretariatan. Langkah ini ditempuh agar penanganan manajemen perkara di bawah komando panitera berjalan lebih terfokus dan terarah.

*Ketiga,* penataan ulang proses manajemen perkara. Penataan ulang proses (business process reengineering) manajemen perkara di Mahkamah Agung merupakan bagian penting dalam pembaruan peradilan. Salah satu kebijakan yang lahir dari kerangka business process reengineering adalah penyederhanaan administrasi dan birokrasi penerimaan berkas perkara di Mahkamah Agung.  Penyederhanaan proses manajemen perkara bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan perkara di Mahkamah Agung dan memudahkan publik dalam pengurusan birokrasi pengadilan, khususnya terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Kedua hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja dan persepsi publik terhadap lembaga peradilan.[[21]](#footnote-22)

Pembaruan administrasi penerimaan berkas tersebut antara lain adalah terkait:

1. **Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas**

Mahkamah Agung pada akhir tahun 2019,  menerbitkan Surat Keputusan Ketua  Mahkamah Agung Nomor [243/KMA/SK/XI/2019 tanggal 27 November 2019](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/peraturan/Pelimpahan_wewenang_penerimaan-berkas.pdf) tentang  Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi, dan Hak Uji Materiil kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020.  Materi muatan pokok dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini adalah penataan ulang proses birokrasi penerimaan dan penelaahan berkas dari yang semula ditangani oleh tiga unit eselon 1 Mahkamah Agung menjadi hanya ditangani oleh1unit kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut. Pertama, kewenangan penerimaan berkas perkara yang semula berada di Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dilimpahkan kepada bagian tata usaha pada Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung. Kedua, kewenangan penelaahan kelengkapan berkas perkara yang semula berada di direktorat pranata dan tatalaksana perkara pada 3 (tiga) direktorat jenderal badan peradilan dialihkan kepada kepaniteraan muda perkara Mahkamah Agung.

1. **Penggunaan Stiker Warna pada Amplop Berkas sebagai Pembeda Jenis Perkara**

**Proses distribusi berkas perkara dari unit penerima ke unit penelaah dapat terkendala ketika informasi jenis perkara tidak dicantumkan, khususnya untuk perkara pidana dan perdata yang berasal dari pengadilan negeri. Untuk mengatasi hambatan ini, Kepaniteraan Mahkamah Agung menerbitkan kebijakan penggunaan stiker warna berdasarkan jenis perkara yang ditempelkan pada amplop berkas. Kebijakan ini dimuat dalam surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 352/PAN/OT.01.3/2/2020 tanggal 13 Februari 2020. Dengan adanya stiker warna yang menjadi penanda berkas, petugas penerima berkas secara visual dapat dengan mudah mengelompokkan berkas perkara berdasarkan asal pengadilan dan jenis perkara. Surat Panitera tersebut dilampirkan pula model amplop berkas dengan pembeda warna berdasarkan jenis perkara.**

1. **Pengaturan Prosedur Pengiriman Berkas ke Mahkamah Agung dalam Keadaan Khusus**

Moda transportasi antar wilayah sempat berhenti beroperasi pada awal mewabahnya Covid-19. Kondisi ini mengakibatkan penyedia jasa pengiriman dokumen di sejumlah daerah menghentikan sementara layanannya.  Beberapa pengadilan tingkat pertama melaporkan kesulitan mengirimkan berkas perkara kasasi/peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.  Merespons kondisi ini, Kepaniteraan Mahkamah Agung menerbitkan surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1017 /PAN/OT.01.3/6/2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal petunjuk pengiriman berkas pada kondisi darurat.

1. **Prosedur Penyampaian Laporan Kasasi Perkara Pidana yangTerdakwanya dalam Status**Tahanan

 Pada penghujung tahun 2020, Panitera Mahkamah Agung mengatur ulang prosedur penyampaian laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya dalam status tahanan melalui surat nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020, tanggal 16 Desember 2020. Surat tersebut ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.  Terhitung mulai 1 November 2021, prosedur baru penyampaian laporan kasasi tersebut diberlakukan juga untuk Mahkamah Syar’iyah di Aceh dalam penanganan perkara jinayat.  Hal ini tertuang dalam Surat Panitera MA [Nomor 2193/PAN/HK.05/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/pengumuman/oktober_prosedur-laporan-kasasi_ms-aceh.pdf).

1. Pembaruan Fungsi Teknis

Upaya pembaruan fungsi teknis badan peradilan harus menjamin terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan. Upaya pembaruan dapat diartikan sebagai upaya untuk merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum dan revitalisasi fungsi pengadilan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, program utama yang perlu dilakukan antara lain adalah penyederhanaan proses berperkara, penyelesaian perkara dengan acara cepat dan berorientasi perdamaian (mediasi), dan penguatan akses pada pengadilan.

Dalam konteks pembaruan fungsi teknis, pembaruan yang telah diupayakan Mahkamah Agung antara lain:

1. Gugatan Sederhana (GS)

Untuk membumikan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, disusunlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil tertentu diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Pada mulanya, berdasarkanPermaNomor 2 Tahun 2015,nilai gugatan maksimal yang dapat diselesaikan melalui Gugatan Sederhana adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya melalui Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, nilai maksimal gugatan materiil yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana ditingkatkan menjadi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

1. Implementasi *Restorative Justice*

Pada tahun 2014Ketua Mahkamah Agung menetapkanPeraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini adalah terobosan agar proses pemeriksaan pidana anak lebih berorientasi pada perdamaian dan *restorative justice*. Jika proses diversi berhasil, maka pemeriksaan pidana dihentikan, kemudian Ketua Pengadilan menerbitkan Penetapan Kesepakatan Diversi. Hal itu tentu memangkas proses penyelesaian perkara yang seharusnya berkepanjangan, menjadi sederhana dan cepat.

1. Penguatan Akses ke Pengadilan

Ada banyak sekali upaya yang dilakukan Mahkamah Agung dan empat badan peradilan di bawahnya untuk penguatan akses ke pengadilan. Upaya-upaya tersebut antara lain: pembebasan biaya perkara, layanan sidang di luar gedung, layanan sidang terpadu, inovasi pembuatan gugatan mandiri, sidang di luar negeri (SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011), penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), dan lain-lain. Upaya-upaya penguatan akses ini terus dimonitoring dan ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

1. Pembacaan Berkas secara Elektronik

Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tentang pedoman penerapan sistem kamar pada Mahkamah Agung RI. Penyempurnaan manajemen perkara pada dasarnya memerlukan prasyarat sebagai pendukung keberhasilan yaitu keberadaan dukungan sistem dan teknologi informasi. Pemanfaatan dokumen elektronik dapat membantu efisiensi dan efektivitas pemeriksaan/pembacaan. Pemanfaatan sistem informasi juga dapat membantu efisiensi dan efektivitas manajemen kalender sidang yang terjadwal dan tercatat. Saat ini pembacaan berkas sudah dapat dilakukan secara elektronik, sehingga dapat memangkas waktu dan dapat mengurangi penggunaan kertas dalam pembacaan berkas perkara.

1. Penguatan Sistem Kamar

Sistem Kamar pada Mahkamah Agung telah dikenalkan sejak tahun 2011, yakni dengan diberlakukannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung.  Surat Keputusan tersebut kemudian disempurnakan beberapa kali.

Tujuan dari penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung adalah: 1) hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara, 2) meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara, 3) mengurangi disparitas putusan, 4) memudahkan pengawasan putusan.

Mahkamah Agung telah berusaha melakukan penguatan sistem kamar tersebut melalui upaya: **penyelenggaraan perdana rapat pleno kamar, pembentukan kelompok kerja penyusunan rencana aksi implementasi sistem kamar pada mahkamah agung, penataan ulang organisasi sistem kamar, dan penyempurnaan kembali pedoman sistem kamar.**[[22]](#footnote-23)

**Keselarasan Pembaruan dengan Nilai-Nilai *Court Excellence***

Apakah pembaruan-pembaruan yang diikhtiarkan Mahkamah Agung tersebut telah linear dengan nilai-nilai *Court Excellence?* Secara tegas dapat dijawab: ya, sesuai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

| **No** | **Pembaruan** | **Nilai *Court Excellence* yang Selaras** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Direktori Putusan | *Transparency, accessibility* |
| 2 | Info Perkara | *Transparency, accessibility* |
| 3 | SIPP | *Transparency, accessibility, certainty, timelines* |
| 4 | Optimalisasi Website | *Transparency, accessibility* |
| 5 | Publikasi Landmark Decision, Yurisprudensi, dan Surat Edaran Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar | *Transparency, accessibility, certainty* |
| 6 | *Virtual Account* | *Transparency, accessibility, certainty, timelines* |
| 7 | *E-Court* | *Transparency, accessibility, certainty, timelines* |
| 8 | Percepatan Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung | *Timelines, competence, integrity, independence, fairness* |
| 9 | Prosedur Baru Rogatory | *Transparency, accessibility, certainty, timelines* |
| 10 | Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | *Transparency, accessibility, timelines, certainty* |
| 11 | Layanan Prodeo, Sidang di Luar Gedung, dan Posbakum | *Accessibility, certainty* |
| 12 | Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) | *Transparency, accessibility, timelines, certainty, fairness, impartiality, independence, competence, equality, integrity* |
| 13 | Perlindungan Perempuan Berhadapan dengan Hukum | *Accessibility, certainty, fairness, impartiality, independence, competence, equality, integrity* |
| 14 | SPPT-TI | *Transparency, accessibility, timelines, certainty, fairness, impartiality, independence, competence, equality, integrity* |
| 15 | Pelayanan Terpadu Sidang Keliling | *Accessibility, timelines* |
| 16 | Pengambilan Salinan Putusan via aplikasi e-Court | *Transparency, accessibility, timelines, certainty* |
| 17 | Penataan Ulang Organisasi Kepaniteraan Dan Kesekretariatan | *Competence* |
| 18 | Penataan Ulang Proses (Business Process Reengineering) Manajemen Perkara di Mahkamah Agung | *Timelines, certainty* |
| 19 | Gugatan Sederhana (GS) | *Timelines, certainty* |
|  | Implementasi *Restorative Justice* | *Fairness, impartiality, independence, equality* |
| 20 | Penguatan Akses ke Pengadilan | *Accessibility, certainty* |
| 21 | Pembacaan Berkas secara Elektronik | *Timelines* |
| 22 | Penguatan Sistem Kamar | *Competence* |

**Kesimpulan**

*The Framework of Courts Excellence* mengakui ada kesepakatan internasional mengenai nilai-nilai inti yang harus diterapkan oleh pengadilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Nilai-nilaitersebut adalah *transparency, accessibility, timelines, certainty, fairness, impartiality, independence, competence, equality,* dan *integrity.*

Dalam bidang manajemen perkara dan pembaruan fungsi teknis, pembaruan yang telah dilaksanakan Mahkamah Agung dan empat badan peradilan di bawahnya antara lain adalah: Direktori Putusan, Info Perkara, SIPP, Website, Publikasi *Landmark Decision*, Yurisprudensi, dan Surat Edaran Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar, *Virtual Account*, *e-Court*, Percepatan Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung, Prosedur Baru Rogatory, PTSP, Layanan Prodeo, Sidang di Luar Gedung, Posbakum, Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, Perlindungan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, SPPT-TI, Pelayanan Terpadu Sidang Keliling, Pengambilan Salinan Putusan via Aplikasi *e-Court,*PenataanUlang Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, Penataan Ulang Proses *(Business Process Reengineering*) Manajemen Perkara di Mahkamah Agung*,*Gugatan Sederhana, Implementasi *Restorative Justice*, Penguatan Akses ke Pengadilan, Pembacaan Berkas secara Elektronik, dan Penguatan Sistem Kamar.

Pembaruan-pembaruan yang diikhtiarkan Mahkamah Agung tersebut linear dengan nilai-nilai inti yang *Court of Excellence.* Mahkamah Agung telah berada pada garis edar yang benar untuk segera mewujudkan visi mulianya: Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Amin.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Aturan Perundang-Undangan dan Dokumen Resmi**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atasPeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ahdalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/Dju/Sk/Hm02.3/2/2018 1530 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

*Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010

*International Framework for Court Excellence, 3rd Edition,* May 2020, [The-International-Framework-3rd-Edition-Amended.pdf (courtexcellence.com)](https://www.courtexcellence.com/__data/assets/pdf_file/0023/66605/The-International-Framework-3rd-Edition-Amended.pdf), akses tanggal 08 Desember 2021

1. **Buku, Artikel, Berita, Dll.**

Asep Nursobah, *Implementasi sistem Kamar pada Mahkamah Agung,*<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/sistem-kamar/sejarah-sistem-kamar>, akses tanggal 9 Desember 2021.

Asep Nursobah, *Prosedur Penyampaian Surat Rogatori dan Surat Bantuan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata bagi Pihak yang Berada di Luar Negeri*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Materi_penyampaian-panggilan-ke-luar-negeri_asep-nursobah.pdf>, akses tanggal 08 Desember 2021.

M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum,* Kencana, Jakarta: 2014.

Pan Mohamad Faiz dan Oly Viana Agustine, *Akses terhadap Keadilan bagi Masyarakat Rentan di Mahkamah Konstitusi,* Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta 10110.

1. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia [↑](#footnote-ref-2)
2. Artinya tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Kutipan tersebut berasal dari tulisan-tulisan Heraclictus yang dikumpulkan oleh Diogenes Laetius dalam *Live of Eminent Philosopher,* Book IX, Sec. 8, diterjemahkan secara harfiah dari Bahasa Yunani oleh C.D. Yonge dan diterbitkan oleh penerbit Henry G. Bohn dari London, pada 1853. [↑](#footnote-ref-3)
3. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010, hlm. iii. [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid, hlm.4. [↑](#footnote-ref-5)
5. *International Framework for Court Excellence, 3rd Edition,* May 2020, hlm. 9 s.d. 10, [The-International-Framework-3rd-Edition-Amended.pdf (courtexcellence.com)](https://www.courtexcellence.com/__data/assets/pdf_file/0023/66605/The-International-Framework-3rd-Edition-Amended.pdf), akses tanggal 08 Desember 2021. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-7)
7. M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum,* (Kencana, Jakarta: 2014), hlm. 85. [↑](#footnote-ref-8)
8. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan…* hlm. 20 [↑](#footnote-ref-9)
9. https://kbbi.web.id/kompeten [↑](#footnote-ref-10)
10. Ibid, hlm. 48. [↑](#footnote-ref-11)
11. Pan Mohamad Faiz dan Oly Viana Agustine, *Akses terhadap Keadilan bagi Masyarakat Rentan di Mahkamah Konstitusi,* Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta 10110, hlm. 126. [↑](#footnote-ref-12)
12. *International Framework for Court Excellence,* hlm. 7. [↑](#footnote-ref-13)
13. Ibid. [↑](#footnote-ref-14)
14. Ibid. [↑](#footnote-ref-15)
15. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210217123230-4-223991/jokowi-puji-habis-transformasi-berbasis-tekno-mahkamah-agung>, diakses pada 21 Februari 2021. [↑](#footnote-ref-16)
16. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020 [↑](#footnote-ref-17)
17. Asep Nursobah, *Prosedur Penyampaian Surat Rogatori dan Surat Bantuan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata bagi Pihak yang Berada di Luar Negeri*, dalam <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Materi_penyampaian-panggilan-ke-luar-negeri_asep-nursobah.pdf>, akses tanggal 08 Desember 2021. [↑](#footnote-ref-18)
18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/Dju/Sk/Hm02.3/2/2018 1530/ Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. [↑](#footnote-ref-19)
19. https://pn-malang.go.id/sosialisasi-sppt-ti-pada-pengadilan-negeri-malang/ [↑](#footnote-ref-20)
20. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. [↑](#footnote-ref-21)
21. Asep Nursobah, *Penataan Ulang Proses Penerimaan/Pengiriman Berkas Perkara di Mahkamah Agung*, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/1863-penataan-ulang-proses-penerimaan-pengiriman-berkas-perkara-di-mahkamah-agung [↑](#footnote-ref-22)
22. Asep Nursobah, *Implementasi sistem Kamar pada Mahkamah Agung,*<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/sistem-kamar/sejarah-sistem-kamar>, akses tanggal 9 Desember 2021 [↑](#footnote-ref-23)